

**PENGENDALIAN PEREDARAN PAKAIAN BEKAS
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Oleh: Tamamal Afiah

tmmlafiah@gmail.com

Pembimbing: Zaili Rusli

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Control in principle is components in the management process that have an important role in the process of achieving the stated objectives and correcting existing irregularities. Control provides answers to irregularities, problems were found, namely the circulation of used clothing in Indragiri Hilir. The purpose of study is knowing how to control and inhibit the distribution of used clothing in Indragiri Hilir. The theoretical concept used is control measures by Siswanto which consist of: set standards, measure performance, compare performance in accordance with standards, and take corrective action. . The research method used is a type of qualitative by expressing fonomenology, the selection of informants using the purposive sampling adn snawball sampling technique. The techniques of collecting data are through observation, interviews, library studies, and documentation. The results of this study the Department of Trade and Industry as the executor of the policy showed that control was never carried out in controlling the circulation of used clothing in Indragiri Hilir.

Keywords: Control, Circulation, Used Clothing.

1.1 Latar Belakang

Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, sehingga kebutuhan akan pakaian jadi terus meningkat seiring perkembangan populasi dunia. Industri pakaian di dunia terus berkembang diikuti oleh berkembangnya perdagangan internasional untuk produk tersebut. Muncullah isu perdagangan pakaian bekas yang didasari oleh berbagai macam alasan. Peredaran pakaian bekas di dunia dapat berupa hibah untuk korban bencana alam ataupun perdagangan biasa seperti lelang baju bekas artis atau sekedar mencari keuntungan dengan harga murah.

Tembilahan merupakan ibu kota dari Kabupaten Indragiri Hilir di bagian timur Provinsi Riau atau pada bagian timur pesisir Sumatera yang di kepung oleh air. Untuk menempuh perjalanan ke negara tetangga seperti Singapura hanya dibutuhkan 6 jam perjalanan dengan menggunakan speed boat. Dengeogeografis seperti ini, sangat memudahkan bagi warga Tembilahan untuk melakukan kontak dagang dengan warga Negara Singapura.

Banyaknya barang bekas yang dijual dikota Tembilahan seperti pakaian bekas, mesin, pompa, kompresor udara, pompa vakum dan lain-lain. Tetapi peminat pakaian bekas yang sangat banayk diminati. Banayaknya Peminat terhadap pakaian bekas impor menyebabkan semakin tingginya frekuensi terhadap permintaan pakaian bekas impor tersebut di Indonesia dan menyebabkan meenurunnya tekstil dalam negeri.

Tabel 1.1 Pasar -Pasar Pakaian Bekas di Tembilahan

No	Nama Pasar	Alamat
1.	Pasar Dayang Suri	Jalan Sudirman
2.	Pasar Umbut Kelapa (Pasar Kayu Jati)	Jalan Kayu Jati
3.	Pasar Pagi	Jalan Baharudin Yusuf
4.	Pasar Jongkok	Jalan Guruh Hasan

Sumber data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir,2017

Dari tabel 1.1 dapat diketahui banyaknya tempat penjualan pakaian bekas yang beredar, ada 4 (Empat) pasar yang menjual pakaian bekas di Tembilahan. Pakaian bekas yang terdapat di Tembilahan terkenal dengan barang *second* yang berkualitas bagus dan murah. Pakaian bekas yang terdapat di Tembilahan begitu diminati oleh masyarakat, baik itu masyarakat Tembilahan maupun masyarakat dari luar Tembilahan. Banyaknya Beredar pakaian bekas tersebut dikarenakan semakin tingginya peminat pakaian bekas, beberapa hal yang membuat pakaian bekas begitu diminati oleh masyarakat yang pertama karena kualitas, rata-rata pakaian bekas impor dalam kondisi yang sangat bagus, dan pembeli dari pakaian bekas tersebut bukan hanya dari kalangan menengah kebawah tetapi juga menengah keatas. Kedua Model pakaian bekas masih merupakan model terbaru, dan ketiga harga pakaian bekas yang sangat miring, biasanya untuk satu buah baju kemeja baru bermerk terkenal jika kita membeli di swalayan atau di mall harganya bisa mencapai Rp. 200.000-

Rp 300.000, jika membeli pakaian bekas anda bisa mendapatkan kemeja dengan model dan merk yang sama dengan harga Rp 30.000. Kebutuhan baju berkualitas dengan harga miring. Jika dilihat dari segi hukumnya, aktivitas penjualan pakaian bekas sangat bertentangan dengan Peraturan yang ada.

Banyaknya barang bekas yang dijual di kota Tembilahan seperti pakaian bekas, mesin, pompa, kompresor udara, pompa vakum dan lain-lain. Tetapi peminat pakaian bekas yang sangat banyak diminati. Banyaknya Peminat terhadap pakaian bekas impor menyebabkan semakin tingginya frekuensi terhadap permintaan pakaian bekas impor tersebut di Indonesia dan menyebabkan meurunnya tekstil dalam negeri. Selama ini pakaian bekas banyak didatangkan dari Negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Adapun dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari peredaran pakaian bekas impor ini salah satunya adalah terhadap perkembangan industri dalam negeri sedangkan dampak positifnya adalah bagi sebagian masyarakat khususnya masyarakat ekonomi kelas menengah yang dapat memperoleh pakaian dengan harga yang murah dan kualitas yang baik.

Tempat perdagangan Pakaian bekas di Tembilahan beberapa kali mengalami perpindahan lokasi. Awalnya berlokasi di bantaran sungai Indragiri berdekatan dengan dermaga transportasi sungai yang oleh masyarakat Tembilahan disebut "tepi laut", di kaki lima, dan sekarang berkembang di ruko/kios, dan menjadi ke beberapa tempat, yakni :

Maraknya pembeli pakaian bekas di Tembilahan membuat bisnis pakaian bekas tersebut sulit untuk dihentikan. Hal itu sebabkan karena bisnis pakaian

bekas di Tembilahan telah berkembang menjadi satu sektor perekonomian yang menjadi tulang punggung bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah. Sangat banyak orang yang telah menggantungkan hidup dari hasil penjualan pakaian bekas impor tersebut. Disana ada agennya, ada kuli yang mengangkut pakaian bekas impor ke kapal, dan ada juga melalui jalur darat, ada kuli yang melakukan bongkar muat di pelabuhan, ada pengusaha mobil yang mengangkut barang, ada tukang becak yang mengantar pakaian bekas ke kios, dan lain sebagainya. Begitu banyak orang yang terlibat disana, sehingga kalau larangan tentang pakaian bekas impor tersebut tetap dilanjutkan tanpa memberi jalan keluar, akan banyak orang yang akan kehilangan mata pencaharian dan mencari pengangguran.

Kerugian yang ditimbulkan dari adanya perdagangan pakaian bekas impor itu lebih kecil jika dibandingkan dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat Tembilahan. Hal itu disebabkan secara resmi keberadaan Pasar Dayang Suri dan Pasar Umbut Kelapa yang menjual pakaian bekas impor itu telah menjadi salah satu objek wisata belanja oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir.

Peredaran pakaian bekas sangat perlu dikendalikan karena di dalam pakaian bekas tersebut terdapat bakteri-bakteri dan sangat merugikan produk tekstil dalam negeri. Tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa "pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas dan tercemar tanpa membeberkan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud" jelas dikatakan bahwa

dilarang memperdagangkan barang-barang bekas termasuk pakaian bekas.

Masih banyaknya beredar penjualan pakaian bekas di kios-kios tersebut, dapat dipertanyakan pelaksanaan akan pengendalian yang terjadi dengan dinas yang mengawasi pasar-pasar pakaian bekas di Kota Tembilahan, yaitu Dinas perdagangan dan perindustrian terhadap peraturan yang ada.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengangkat permasalahan tentang: **“Pengendalian Peredaran Pakaian Bekas Di Indragiri Hilir”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitan ini antara lain:

1. Bagaimanakah Pengendalian Peredaran Pakaian Bekas di Indragiri Hilir?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat Pengendalian Peredaran Pakaian Bekas di Indragiri Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis Pengendalian peredaran Pakaian Bekas Di Indragiri Hilir
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat Pengendalian Peredaran Pakaian Bekas di Indragiri Hilir

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang didapat

pada mata kuliah yang di jurusan Ilmu Administrasi Publik.

- b. Dapat dipergunakan sebagai masukan bagi peneliti lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat pada mata kuliah di jurusan Ilmu Administrasi Publik.
- b. Bagi Dinas perdagangan dan perindustrian dan pihak-pihak yang terkait, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam hal mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian peredaran pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan sebagai bahan informasi untuk mengetahui adanya larangan peredaran impor pakaian bekas.

1.5 Konsep Teori

1.5.1 Pengawasan

Salah satu komponen pengendalian intern yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan/prestasi pengendalian intern. Pengawasan dalam sistem pengendalian intern diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan, Menurut **Armando (2013)**.

Dan Menurut **Sujanto** dalam (**Fitriani, 2015**) mengatakan pengawasan merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai sesuai dengan yang semestinya atau tidak, yang menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan.

1.5.2 Pengendalian

Pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi dapat terlaksana dengan baik. Definisi ini mengandung makna bahwa pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yaitu mengusahakan agar segala sesuatu pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, **Harvelina (2015)**.

Pengendalian adalah “Tugas untuk mencocokkan sampai dimana program atau rencana yang telah digariskan itu dilaksanakan”. Menurut **Soekarno** dalam (**Nurhasanah, 2017**). Sedangkan **Suhardi** dalam (**Nurhasanah, 2017**) mengatakan bahwa pengendalian adalah “Salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi dapat terlaksana dengan baik”. Definisi ini mengandung makna bahwa pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yaitu mengusahakan agar segala sesuatu pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain system umpan balik informasi, membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur

signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan.

Menurut **Siswanto (2017)** terdapat empat langkah dalam pengendalian, yaitu sebagai berikut:

- a. Menetapkan standard dan metode untuk pengukuran kinerja (*establish standard and methods of measuring performance*)
- b. Mengukur kinerja (*measure the performance*)
- c. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar (*compare the performance match with me standar*)
- d. Mengambil tindakan perbaikan (*take corrective action*)

1.6 Lokasi Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi tempat dilakukannya penelitian ini adalah di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Satpol PP Di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Lokasi ini didasarkan karena Tembilahan merupakan pusat importir pakaian bekas terbesar di Riau.

1.6.2. Informan Penelitian

peneliti menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*. Sampel secara sengaja ditetapkan oleh peneliti. Adapun Informan pada penelitian ini antara lain :

- a) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir
- b) Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir

- c) Kepala Bidang Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir
- d) Satpol PP

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, interview, dan dokumentasi.

1.6.5 Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan model analisis data **Creswell (2016)**. Umumnya, penulis kualitatif menggunakan prosedur yang umum dan langkah-langkah khusus dalam analisis data. **Creswell** mengajak penulis kualitatif untuk melihat analisis data kualitatif sebagai suatu proses penerapan langkah-langkah dari yang spesifik hingga umum dengan berbagai level analisis yang berbeda.

1.7 Pembahasan

1.7.1 Pengendalian Peredaran Pakaian Bekas Di Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tembilahan adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran pakaian bekas. Pengendalian adalah proses pengawasan, perbandingan, dan perbaikan kinerja, karena pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya.

Dalam menjawab tujuan dari penelitian, mengacu pada teori **Siswanto (2017)** sebagai pedoman atau instrumen penelitian. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan dan menguraikan tentang indikator-indikator tersebut yang di dukung oleh data-data informasi yang berhasil di dapatkan oleh penulis sesuai dengan fakta yang

ada dilapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk membahas masing-masing indikator dalam Pengendalian peredaran pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir. Maka penulis membuat beberapa pertanyaan melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan diantaranya membuat beberapa informan. Jawaban-jawaban tersebut kemudian penulis uraikan berdasarkan indikator-indikator yang telah dikemukakan sebelumnya.

a. Menetapkan Standar

Menentukan standar adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan suatu pekerjaan dapat dicapai dan menggunakan standarisasi seperti apa. Menentukan standar yang dilakukan dalam pengendalian peredaran pakaian bekas yang harusnya dikendalikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian khususnya bidang pasar dan perdagangan dan bekerjasama dengan Satpol PP. Namun pada realitanya, khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian dibidang pengelolaan pasar dan perdagangan tidak memiliki standar baku pengendalian peredaran pakaian bekas atau biasa disebut standar operasional (SOP).

b. Mengukur Kinerja

Dalam proses pengukuran yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pasar Kota Tembilahan agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Namun permasalahan yang ada standar tertulis yang ditetapkan oleh Bidang Pengelolaan Pasar belum dibuat dan ditetapkan hingga sampai saat ini penetapan tugas yang diberikan ditentukan oleh Kepala Bidang atau dimandatkan oleh Kepala Seksi kepada bawahan atau secara berkala.

Namun pada kenyataannya tidak ada pengawasan yang dilakukan dari bawahan untuk diberikan laporan kepada pimpinan atas hal-hal yang dilakukan agar terciptanya suatu pengendalian yang sesuai dengan peraturan kementerian perdagangan.

c. Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar

Penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan guna mengetahui penyimpangan yang terjadi terhadap peraturan kementerian perdagangan tersebut atau suatu bentuk pengendalian yang harus dilakukan agar tugas pokok dan fungsi masing-masing pekerja dapat relevan dengan tujuan dan perencanaan organisasi dan hal ini juga akan bermanfaat untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan diambil dalam tindakan perbaikan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang sama dan berulang kali. Namun pada kenyataannya laporan yang disampaikan secara lisan ataupun tulisan tidak ada. Sesuai dengan kutipan wawancara sebelumnya oleh kepala Bidang Pasar dan perdagangan bahwa mereka tidak melakukan pengawasan terlebih pengendalian, tidak ada koordinasi dan tidak ada perintah dari atasan, jadi penyimpangan-penyimpangan tersebut terus terjadi dan pedagang akan semena-mena melanggar aturan tersebut.

d. Mengambil tindakan perbaikan

Tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mengendalikan peredaran pakaian bekas hanya menstabilkan barang dan mengatur kesemrawutan pasar pakaian bekas, dalam artian daripada pedagang tersebut berjualan di pinggir jalan lebih baik diberi kios-kios.

1.7.2 Faktor-faktor yang Menghambat Pengendalian Peredaran Pakaian Bekas di Indragiri Hilir

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor utama penghambat dalam pengendalian peredaran pakaian bekas di Kota Tembilahan. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, faktor ekonomi menjadi penyebab mengapa perdagangan pakaian bekas masih banyak ditemukan di Kota Tembilahan.

b. Faktor Kultur Budaya

Berdasarkan hasil penelitian, selain faktor ekonomi yang telah diuraikan sebelumnya, faktor kultur budaya juga menjadi penghambat pengendalian peredaran pakaian bekas tersebut di Kota Tembilahan.

c. Faktor Letak Wilayah

Faktor ini menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Tembilahan. Hal ini disebabkan karena Kota Tembilahan yang terletak dibagian Timur Provinsi Riau atau bagian Timur Pesisir Sumatera yang wilayahnya di kepung oleh air.

d. Faktor Komunikasi dan koordinasi

Komunikasi dan koordinasi juga menjadi faktor penghambat pengendalian peredaran pakaian bekas di Kota Tembilahan. Komunikasi merupakan pertukaran informasi untuk melakukan tujuan tertentu dalam berpartisipasi ataupun pekerjaan, bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang

lainnya. Pemahaman terhadap pekerjaan akan didapat melalui komunikasi, dan dalam mencapai sebuah keberhasilan sangat diperlukan koordinasi yang baik agar tercapai tujuan bersama yang tidak hanya mementingkan satu pihak dan tidak terjadi kesalahan. Jadi pemahaman terhadap suatu wewenang dan tugas oleh instansi yang terkait sangat diperlukan agar terciptanya koordinasi dalam mengendalikan peredaran pakaian bekas.

1.8 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisa yang peneliti lakukan dapat disimpulkan pengendalian peredaran pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Pengendalian peredaran pakaian bekas di Tembilahan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Indragiri Hilir dilihat dari langkah-langkah pengendalian menurut Siswanto (2017) meliputi menetapkan standar, mengukur kinerja, membandingkan kinerja sesuai dengan standar, dan mengambil tindakan perbaikan , menunjukkan Pengendalian peredaran pakaian bekas tidak pernah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dinas Perdagangan dan Perindustrian tersebut menganggap merapikan tempat berdagang pakaian bekas agar tidak semrawut dan lebih tertata adalah bentuk dari tindakan perbaikan, padahal sangat jelas pakaian bekas tersebut dilarang tetapi malah diberi peluang kembali. Standar yang di gunakan yaitu Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang

Larangan Impor Pakaian Bekas, belum pernah dilakukan.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Pengendalian peredaran pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir adalah faktor ekonomi, kultur budaya, kurangnya sumber daya manusia, letak wilayah, komunikasi dan koordinasi, kekerabatan dan ketidakpahaman Dinas Perdagangan dan Perindustrian terhadap tugasnya dalam Pengendalian peredaran pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin. (2017). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung,: Alfabeta.
- Brantas. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2016). *Reseach Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darwis, dkk. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan.
- Effendi, Usman. (2015). *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, M. (2015). *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah..* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Irham, Fahmi. (2016). *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep dan Kinerja*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Irham, Fahmi. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Noor, Juliansyah. (2015). *Penelitian Ilmu Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Novitasari, Erna. (2017). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Quadrat.

- Relawati, Rahayu. (2012). *Dasar Manajemen Pendekatan Aplikasi Bidang Pertanian*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ranupandojo, Heldjrachman. dkk. (2002). *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Siswanto. (2017). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sule, Ernie Tisnawati & Kurniawan Saefullah. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana
- Sumarsono, Sonny. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Solihin, Ismail. (2010). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Wijayanti, Irene Diana Sari. (2012). *Manajemen*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Winardi. (2006). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: PT Alumni.
- Yahya, Yohannes. (2006). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jurnal**
- Aditya, R. (2017). Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (studi kasus di Tembilahan). *Skripsi*. 109.
- Anggraini. (2015). Pengendalian Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh (Studi Kasus: Pengendalian Pedagang Malam Jalan Soekarno Hatta/Jalan Sudirman). *Jom FISIP*, 2(2), 1-12.
- Armando, G. (2013). Pengaruh Sistem pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan keuangan Pemerintah (Studi Empiris ada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Bukittinggi). *Skripsi*, 125.
- Baihaqi. (2016). Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan Dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan. *Libria*, 8(1), 129-142.
- Fitriani, Z. (2015) Pengawasan Dan Pengendalian Hewan Ternak Liar Oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012-2013. *Jom FISIP*, 2(2), 1-13.
- Harvelina, w. (2015). Pengawasan Dan Pengendalian Kualitas Air Di Kecamatan Tembilahan Kota. *Jom FISIP*, 2(1), 1-10.
- Lumempouw. (2015). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penjualan Kredit Pada Pt. Sinar Pure Foods International. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4), 312-323.
- Marpaung, R. (2013). Pengaruh Faktor Disiplin Kerja Dan Pengawasan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (Pada Pt. Perkebunan Xyz Pabrik Kelapa Sawit. *Jurnal Ekonomi*, 21(1), 1-18.
- Nurhasanah. (2017). Analisis Kinerja Bidang Pengendalian Operasional di Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jom FISIP*, 4(2), 1-15.
- Riana. (2018). Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Tanjungbalai. *Skripsi*. 146
- Salim, F. A. (2015). Analisis Penerapan Sitem Informasi Akuntansi Dalam Mendukung Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Bukopin Manado. *Jurnal EMBA*, 3(1), 1034-1043.
- Yunarni. (2015). Dampak Penjualan Pakaian Bekas terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Senapelan Pekanbaru. *Skripsi*, 109.
- Website**
- <https://news.detik.com/2-ribu-koli-tekstil-impor-bekas-diselundupkan-via>

[pelabuhan](#) diakses pada tanggal 1 Agustus 2016 pukul 16.00 WIB.
<https://www.kompasiana.com/kabutteduh/55f6800e3f23bd202d8c549b/pakaian-bekas-riwayatmu-kini> diakses pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 15.20 WIB.